

SENGKETA KEBIJAKAN PELABUHAN JOHOR MALAYSIA DAN SINGAPURA

PADA TAHUN 2018

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Karya Ilmiah Akhir Prodi Hubungan
Internasional Fakultas Psikologi Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Islam

Indonesia



Disusun Oleh:

Alhamda Bachzan

NIM.14323036

Dosen Pembimbing

Karina Utami Dewi S.IP.,MA.

PRODI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI ILMU SOSIAL DAN BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**SENGKETA KEBIJAKAN PELABUHAN JOHOR MALAYSIA DAN
SINGAPURA PADA TAHUN 2018**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan

Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat

Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

ISLAM

Mengesahkan

**Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya**

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1. Karina Utami Dewi, S.IP., M.A**
- 2. Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A**
- 3. Enggar Furi Herdianto, S.I.P, M.A**

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Alhamda Bachzan
No. Mahasiswa : 14323036
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Sengketa Kebijakan Pelabuhan Johor Malaysia dan Singapura Pada Tahun 2018

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta,

Yang menyatakan

Materai

Rp 6000.00

Alhamda Bachzan

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin

Penelitian ini saya persembahkan kepada :

Mama dan Papa

Teruntuk mama dan papa, apa yang telah aku capai hingga hari ini bukanlah menjadi suatu titik akhir yang dapat ku banggakan kepada mama dan papa.

Di dalam lembaran kertas ini telah tertuai doamu dan peluhmu agar aku dapat menyelesaikan studiku. Maka dari itu, izinkan aku untuk mengucapkan rasa terima kasihku yang sebesar-besarnya atas segala do'a, dukungan, nasehat, dan cinta yang telah kalian berikan sehingga aku bisa mempersembahkan secarik kertas hasil perjuanganku.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

HALAMAN MOTTO

“A man who doesn’t spend time with his family can never be a real man”

Don Vito Corleone from *The God Father*

“Tetaplah semangat, kobarkan api pantang menyerah, selesaikanlah yang telah kau mulai jangan putus asa!”

Alhamda Bachzan -



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang berkat rahmat serta kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik, sebagai salah syarat menyelesaikan perkuliahan. Sholawat beriringkan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa prosesnya tak lepas dari bimbingan, dorongan maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis berkeinginan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, yang selalu mengaliri rahmat-Nya tanpa henti kepada penulis.
2. Kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya sepenuh hati, dengan tulus memberikan semangat baik materil maupun non-materil. Tak dapat lagi diungkapkan dengan kata-kata, Mama dan Pada adalah segalanya bagi Anda.
Terima Kasih Ma! Pa!
3. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., MA.g., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Irawan Jari, S.IP., M.Hum., M.S.S., selaku Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan pada setiap proses perkuliahan penulis dari awal hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Semoga Ilmu yang Bapak berikan menjadi amalan yang terus mengalir.
6. Miss Karina Utami Dewi, S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersabar dan mau meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan semangat selama proses pembuatan penelitian ini. Atas ilmu dan nasehatnya terima kasih, semoga Ilmu yang Miss berikan menjadi amalan saleh yang terus mengalir.
7. Seluruh dosen Program Studi Hubungan Internasional UII yang dengan ikhlas membimbing, memberikan ilmu, dan meluangkan waktunya agar dapat mencetak generasi-generasi yang Ulil Albab. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki yang tidak terduga dan arah yang tidak disangka-sangka.
8. Mbak Mardiatul Khasanah yang telah membantu segala urusan baik administrasi maupun non-administrasi perkuliahan dan juga memberikan pelayanan terbaiknya selama penulis meminta pertolongan. Semoga Allah melancarkan semua urusannya.
9. Kepada Maghfira Karisra Putri Mafenska S.Phil, terima kasih banyak telah menemani penulis dari awal semenjak perkuliahan disini hingga saat sekarang. Ups and downs u always stay with me. Supported me in any conditions. No matter what happen. Segala keluh kesah, segala kekurangan ku, kamu selalu bisa menerimanya.

10. Teman-teman seperjuangan sederah, khususnya Grup Awak Sanak Kan?
Terima kasih telah memberikan warna bagi kehidupan saya. Kalian adalah sahabat, teman, musuh, serta saudara dalam satu paket komplis harga gabisa ditawar paling terbaik yang pernah saya miliki! Bagi teman-teman yang belum selesai, tetap semangat! Jaga asa tetap ada! Kalian pasti bisa!
11. Mas Bintang Mupiza S.Hub Int, teman sekaligus mentor per-HI-an, terima kasih banyak atas segala saran serta supportnya selama di perkuliahan! Khususnya, terima kasih atas saran judul dan temanya.
12. Kepada Andi dan Ikmal terima kasih atas nasehat kalian! Benar-benar terima kasih! I dont know how can i solve this problem if i dont have u guys!. I'm glad to have u both! U r my brother from another mother! Really, if we talk about ages, u both, older than me hahahaha.
13. Alfian dan Gharby, terima kasih telah memberikan arahan kepada saya! Kalian orang yang paling terus terang kalo gasuka sama teman hahaha.
14. Anak-anak kos farel cs, Firman, Anang, Bagas, Dzikra, Hafid, Jo, Akbar, Tezar teman mabar eM eL dan Pabjii ta lageee?? Hahah terima kasih semangatnya yang telah diberikan serta petuah-petuahnyanya! See u on top!
15. Kepada Olky dan istrinya, makasih ya atas nasehat kehidupannya!
16. Teman-teman tongkrongan Gaming House a.k.a burjo, terima kasih
17. Kepada Zeeshan, terima kasih atas motivasi nya dan energi positifnya kepada penulis.
18. Teman-teman seangkatan Hubungan Internasional yang telah berjuang bersama dalam menempuh pendidikan selama lima tahun ini.

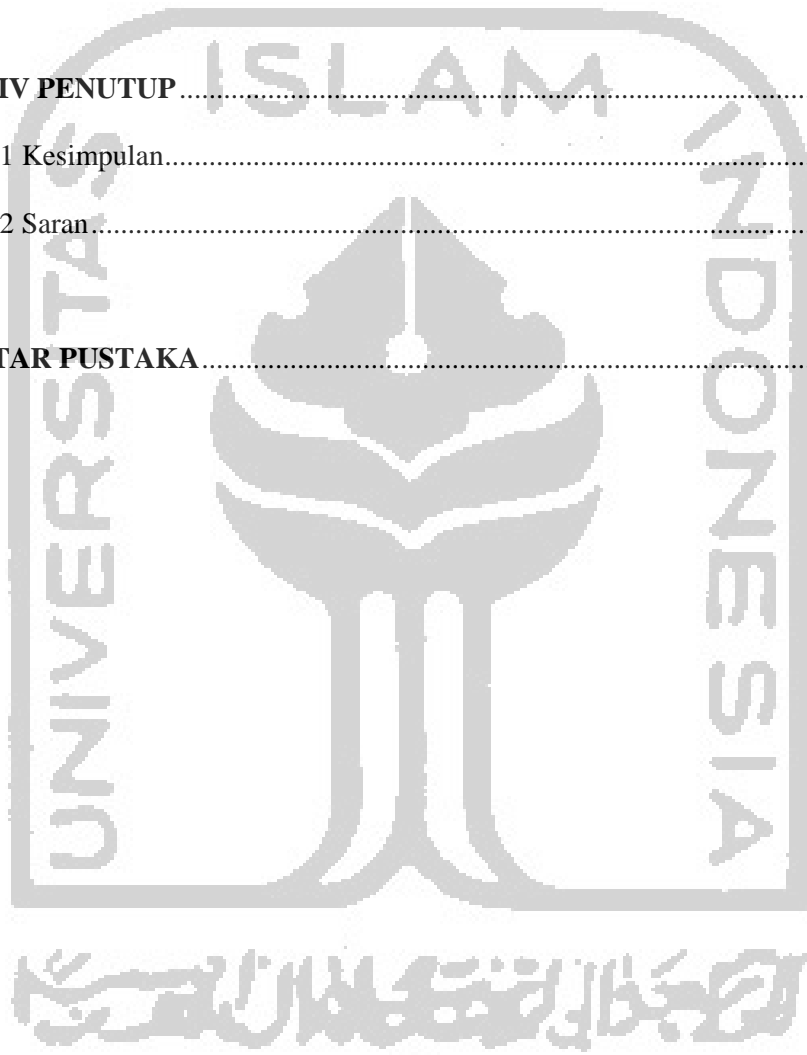
19. Seluruh pihak yang tidak bisa dituliskan seluruhnya oleh penulis. Terima kasih atas doa, motivasi serta dukungannya.



HALAMAN DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	2
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	3
HALAMAN PERSEMBAHAN	4
HALAMAN MOTTO	5
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI	10
BAB I PENDAHULUAN	14
1.1 Latar Belakang	14
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan	16
1.4 Signifikansi	17
1.5 Cakupan Penelitian	17
1.6 Tinjauan Pustaka	19
1.7 Landasan Teori/Pendekatan	23
1.8 Metode Penelitian	27
1.8.1 Jenis Penelitian.....	27
1.8.2 Subjek Penelitian	28
1.8.3 Metode Pengumpul Data.....	28
1.8.4 Proses Penelitian	28
BAB II PENDEKATAN KEAMANAN SEKTOR POLITIK YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN MALAYSIA DI PELABUHAN JOHOR	29
2.1 Faktor Ideologi.....	31
2.2 Faktor Institusi.....	39
2.3 Faktor Bentuk Wilayah.....	42
BAB III PENDEKATAN KEAMANAN SEKTOR EKONOMI DALAM KEBIJAKAN MALAYSIA TERHADAP PELABUHAN JOHOR	47

3.1 Analisa dan Kerentanan Ekonomi.....	48
3.2 Sistem Ekonomi	50
3.3 Tren Globalisasi	53
3.4 Dinamika Regional.....	56
BAB IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65



DAFTAR TABEL

2.1 Rangkuman dari Analisis berdasarkan konsep pendekatan keamanan milik
Buzan..... 45

3.1 Rangkuman dari Analisis berdasarkan konsep pendekatan ekonomi milik
Buzan..... 59



Abstrak

Isu sengketa maritim telah banyak terjadi di publik internasional. Isu tersebut tak jarang antar banyak negara. Isu ini dapat menimbulkan konflik antar regional dan dapat merusak hubungan diplomatik antar negara. Kasus sengketa maritim kebijakan perluasan wilayah pelabuhan Johor adalah salah satunya. Konflik ini terjadi antara Malaysia dan Singapura. Dimana, Malaysia menganggap wilayah yang menjadi acuan untuk perluasan merupakan masih menjadi teritorial mereka. Inilah yang menjadi kecaman serta protes keras dari Singapura. Akibatnya, Malaysia merasa terancam dan perlu adanya tindakan tepat atas reaksi Singapura agar menjaga kepentingan nasional mereka. Faktor yang membuat Malaysia merasa adanya ancaman dari Singapura antara lain, faktor politik serta ekonomi yang mereka rasakan. Untuk itu, penulis akan menganalisis menggunakan konsep pendekatan Security milik Barry Buzan.

Kata Kunci: *Malaysia, Singapura, Sengketa Maritim, Pendekatan Security, Barry Buzan*

Abstract

The issue of maritime disputes has occurred in the international public. This issue is not uncommon among many countries. This issue can lead to conflicts between regions and can damage diplomatic relations between countries. One of the cases of maritime dispute over the expansion of the Johor port area. This conflict occurred between Malaysia and Singapore. Where, Malaysia considers the area which is a reference for expansion is still their territory. This is the criticism and strong protest from Singapore. As a result, Malaysia feels threatened and the need for appropriate action on Singapore's reaction to safeguarding their national interests. Factors that make Malaysia feel a threat from Singapore include the political and economic factors they feel. For this reason, the writer will analyze using Barry Buzan's Security approach.

Keywords: *Malaysia, Singapore, Maritime Dispute, Security Approach, Barry Buzan*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perjanjian antara pemerintah Malaysia dan pemerintah Singapura untuk membatasi secara tepat batas wilayah perairan sesuai dengan perjanjian penyelesaian selat dan perjanjian perairan teritorial Johor 1927 ditandatangani pada 7 Agustus 1995. *State of Johor* menyatakan bahwa batasnya adalah garis imajiner yang mengikuti pusat saluran laut dalam di Selat Johor. Selat Johor memisahkan pulau Singapura dari Johor, negara bagian paling selatan di Semenanjung Malaysia. Perjanjian 1995 dinegosiasikan setelah kedua negara menyelesaikan survei hidrografi bersama untuk secara tepat membatasi batas berdasarkan saluran laut dalam (Beckman & Schofield, 2009, hal. 1-35).

Berdasarkan Perjanjian Johor tanggal 19 Oktober 1927, yang disebut dengan '*The 1927 Agreement*', Perjanjian ini dibuat antara Yang Mulia Sir Hugh Charles Clifford, Gubernur dan Panglima Besar dengan Yang Mulia Ibrahim bin Almarhum Sultan Abu Bakar Sultan dari Johor. Perjanjian ini dilanjutkan oleh Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Singapura yang berubah menjadi '*the Contracting Parties*' (Charney & Alexander, 2004, p. 2351).

Perjanjian 1927 diperbaharui melalui Perjanjian 1995 yang mendefinisikan batas dengan garis lurus yang menghubungkan 72 titik dasar

yang ditentukan oleh koordinat geografis yang ditetapkan dalam lampiran. Perjanjian tidak membatasi batas sekitar Pedra Branca, sebagian karena daerah ini berada di luar Selat Johor dan dengan demikian tidak ditangani berdasarkan 1927 Perjanjian yang Kesepakatan 1995 dirancang untuk memperbarui dan menggantikan, dan sebagian karena perselisihan atas persetujuannya tertunda sebelum ICJ pada saat batas dinegosiasikan (Beckman & Schofield, 2009, hal. 1-35)

Perjanjian 1995 relevan dengan pembatasan batas maritim di Selat Singapura karena ia menetapkan menyetujui poin dengan koordinat geografis di timur dan barat Singapura di mana Selat Johor bertemu Selat Singapura. Karena kedekatan titik-titik ini ke pulau-pulau Indonesia, batas laut teritorial di dua wilayah ini akan membutuhkan perjanjian tiga pihak antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura (Beckman & Schofield, 2009, hal. 1-35).

Pada tahun 1997, Batas pelabuhan Singapura di sebelah barat Raffles Lighthouse diperpanjang sedikit untuk pengaturan lalu lintas pengiriman yang lebih baik di sekitarnya. Berlanjut pada tahun 1999, dimana Malaysia menerbitkan batas pelabuhan Johor Bahru yang telah diperbarui, yang masih melacak batas laut teritorial yang diklaim dalam peta tahun 1979. Selama 20 tahun ke depan, batas ini tetap utuh. Singapura terus menjalankan yurisdiksinya di perairan yang sekarang ditutupi oleh perpanjangan batas pelabuhan, tanpa protes dari Malaysia (Asia, 2019).

Pada tanggal 25 Oktober 2018, Perubahan batas pelabuhan Johor Bahru diumumkan melalui Federal Government Gazette oleh Malaysia, dalam dokumen yang diterbitkan oleh Jaksa Agung. Batas pelabuhan yang berubah, meluas secara signifikan ke arah timur melampaui klaim laut teritorial di area yang dibuat pada peta Malaysia tahun 1979 (Asia, 2019).

Wacana tersebut merupakan kebijakan lama Mahathir Mohamad pada 2001 silam sebelum beliau digantikan sebagai Perdana Menteri. Perluasan pelabuhan serta pembangunan jembatan antar kedua negara untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di perbatasan kedua negara. Rencana tersebut ditentang oleh Singapura karena pembangunan jembatan tersebut tidak efisien serta perluasan pelabuhan dirasa tidak terlalu penting saat itu. Serta Malaysia dianggap telah melanggar 1927 Agreement yang telah disepakati kedua negara (Charney & Alexander, 2004).

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang tersebut, penulis mendapatkan rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini.

Mengapa Malaysia membuat kebijakan pada tahun 2018 yang melanggar perjanjian 1927 yang telah disepakati dengan Singapura?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mendapat beberapa poin penting seperti:

1. Menjelaskan serta memaparkan motif di balik tindakan Malaysia dalam kebijakannya tersebut.

2. Menganalisis sampai sejauh mana tindakan Malaysia yang dianggap Singapura melanggar wilayah perbatasan antara kedua negara.
3. Memaparkan secara ringkas indikator-indikator yang mempengaruhi motif Malaysia.

Diharapkan, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan ilmu Hubungan Internasional, baik secara teori maupun konsep dari kajian penelitian yang dilakukan oleh peneliti maupun dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan kajian yang sama atau berhubungan dengan kajian peneliti ini sendiri.

1.4 Signifikansi Penelitian

Dalam penelitian ini, akan memberikan pandangan baru terhadap sengketa maritim yang terjadi dengan melihat motif Malaysia dengan menggunakan Pendekatan Sekuritas milik Barry Buzan dkk. Melalui perjanjian bilateral pada tahun 1927 antara Malaysia dan Singapura peneliti mencoba memberikan posisi Malaysia dalam sengketa ini.

Pada dasarnya, topik sengketa ini sudah banyak dibahas dalam kajian ilmu Hubungan Internasional maupun ilmu lainnya. Namun, dalam penelitian ini menggunakan pemaparan teori yang berbeda sehingga didapatkan poin-poin maupun hasil yang berbeda.

1.5 Cakupan Penelitian

Mahathir Mohamad resmi menjadi perdana menteri ketujuh Malaysia pada tanggal 10 Mei 2018 mewarisi kondisi yang tidak terlalu cemerlang, sementara terikat janji-janji untuk meringankan beban rakyat sebagaimana tertuang dalam manifesto politik Pakatan Harapan. Pakatan Harapan merupakan aliansi oposisi yang dinakhodainya dan kemudian mengantarkannya kembali ke kursi perdana menteri setelah ditinggalkannya tahun 2003 lalu (BBC, 2018).

Tak lama setelah ia menjadi perdana menteri untuk kedua kalinya, Dr Mahathir menghidupkan kembali perselisihan lama. Antara lain, katanya harga air yang dijual ke Singapura harus dinaikkan setidaknya 10 kali. Tetapi Singapura telah menunjukkan bahwa Perjanjian Air 1962 dijamin oleh kedua negara dalam Perjanjian Pemisahan 1965. Serta pada tahun 2000 berencana untuk menggantikan jalan lintas negara dengan jembatan baru, dengan mengatakan bahwa hal itu akan meningkatkan arus lalu lintas dan memungkinkan kapal untuk menyeberangi Selat Johor. Singapura mengatakan bahwa proyek itu tidak perlu karena jalan lintas dalam keadaan baik. Namun Abdullah Badawi, pengganti Dr Mahathir, membatalkan rencana tersebut pada tahun 2006 (Mokhtar, 2018).

Mengutip keprihatinan atas kedaulatan dan kepentingan nasional, Loke mengatakan Malaysia akan membahas rencananya secara lebih rinci dengan Singapura, dan jika perlu merujuk masalah tersebut ke Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Sejak 1974, lalu lintas udara di Negara

Bagian Johor selatan, dekat perbatasan Singapura, telah ditangani oleh Singapura (Iwamoto, 2018).

Untuk penelitian ini, peneliti lebih terfokus pada tahun 2018 yang mana, semenjak terpilihnya kembali Mahathir Mochamad sebagai Perdana Menteri Malaysia menerapkan kebijakan serupa yang dianggap melanggar perjanjian 1927 antara kedua negara. Untuk penelitian tidak akan membahas terlalu dalam serangkaian perjanjiannya serta konflik-konflik lain yang terjadi antara kedua negara.

1.6 Tinjauan Pustaka

Konflik sengketa antara Malaysia dan Singapura mengenai kedaulatan Pedra Branca muncul setelah Malaysia menerbitkan peta pada 21 Desember 1979, berjudul “Perairan Teritorial dan Batas Landas Kontinental Malaysia”. Peta 1979 menggambarkan pulau itu berada di dalam perairan teritorial Malaysia. Singapura bereaksi dengan mengeluarkan nota diplomatik tertanggal 14 Februari 1980, menantang "klaim" Malaysia atas pulau dan perairan sekitarnya, dan meminta agar peta diperbaiki. Ini memicu pertukaran korespondensi antara kedua negara, menyusul banyak terjadinya serangkaian pembicaraan antar pemerintah di 1993-94 (Beckman & Schofield, 2009, hal. 1-35).

Status Middle Rocks dan South Ledge diangkat sebagai masalah pada putaran pertama perundingan antar pemerintah pada tanggal 6 Februari 1993, ketika Singapura merujuk ke dua fitur dalam konteks klaimnya terhadap Pedra Branca. Pada bulan Februari 2003, kedua negara

menandatangani perjanjian untuk merujuk sengketa ke ICJ. Pada 24 Juli 2003, mereka memberi tahu registrar melalui surat bersama Perjanjian Khusus mereka, meminta Pengadilan untuk menentukan apakah kedaulatan atas Pedra Branca, Middle Rocks, dan South Ledge adalah milik Malaysia atau Singapura (Beckman & Schofield, 2009, hal. 1-35).

Definisi garis batas yang jelas di Selat Singapura sangat penting adalah kegunaannya dalam memerangi kegiatan ilegal tertentu di Selat Singapura, seperti perampokan bersenjata terhadap kapal, pembuangan ilegal minyak atau limbah minyak, penyelundupan, dan kejahatan lainnya di laut. Dalam artikel tersebut, pemaparan isu menggunakan pandangan hukum UNCLOS. Serta di sini, lebih berfokus terhadap penyelesaian konflik sengketa yang terjadi (Beckman & Schofield, 2009, hal. 1-35).

Situasi konflik dan persengketaan Malaysia dan Singapura ini seperti menjadi babak baru kedua negara sekaligus membuka luka lama. Malaysia dan Singapura yang pernah saling memperebutkan wilayah Pedra Branca yang dimenangkan oleh Singapura. Pemerintah Malaysia mendasari konflik ini dengan alasan mempertahankan kedaulatannya.

Sebagaimana yang terdapat di dalam artikel ditulis oleh Rizky Ihsan yang berjudul “*Sengketa Batas Darat dan Diplomasi Perbatasan Indonesia terhadap Malaysia*”, upaya dalam penyelesaian konflik ialah Diplomasi. Diplomasi, sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negeri, perlu dilandasi oleh pertimbangan serta kalkulasi *cost and benefit* bagi kepentingan nasional. Dalam kerangka *rational decision making*, pengambil

kebijakan memilih opsi politik berdasarkan urutan dan skala prioritas, di mana keputusan akan mengikuti logika dan kalkulasi untung dan rugi (Ihsan, 2019, hal. 4-5).

Dalam melakukan analisis terhadap negosiasi, ada beberapa hal krusial yang perlu menjadi perhatian bagi tim perunding, antara lain *pertama*, identifikasi permasalahan dan artikulasi posisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, *kedua*, implikasi isu terhadap kepentingan negara, *ketiga*, kepentingan relatif sesuai derajat ataupun bobot kepentingannya, dan *keempat*, memperhitungkan kemungkinan untuk melakukan kompromi terhadap lawan berunding (Ihsan, 2019, hal. 4-5).

Dalam artikel tersebut, hubungan dengan tulisan penelitian ini dalam konflik sengketa antara Malaysia dan Indonesia terdapat dimana tindakan Malaysia melakukan tindakan preventif yang merasa kedaulatannya terganggu serta motif ekonomi sesuai dengan sektor politik dan ekonomi yang diklasifikasikan oleh Buzan dkk. Namun dalam artikel diatas, pemaparan konflik menggunakan *Rational Choice* dengan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.

Dalam buku yang berjudul *Strategic Control* oleh Rebecca Fabrizi, pada tanggal 12 Juli, pengadilan mengadakan pertemuan berdasarkan pasal VII Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) terhadap Tiongkok dalam perselisihannya dengan Filipina atas beberapa wilayah di Laut Cina Selatan. Ini bertepatan dengan Rodrigo Duterte 'Filipino Trump' mengambil alih kekuasaan di Manila (Fabrizi, 2017, hal. 320-323).

Tiongkok menegaskan kedaulatan atas setiap wilayah di dalamnya berdasarkan '*Nine-Dash Line*', yang ambigu tetapi pada dasarnya mencakup semua wilayah di Laut Cina Selatan. Ada lima negara lainnya yang ikut terlibat. Beijing menegaskan bahwa perselisihan di Laut Cina Selatan tak lebih dari tentang kedaulatan, dan sebagaimana mestinya diselesaikan melalui negosiasi bilateral antar negara. Bahkan, secara eksplisit menyatakan bahwa ia tidak akan 'memutuskan pertanyaan kedaulatan wilayah darat dan tidak akan membatasi batas laut antara pihak-pihak lainnya (Fabrizi, 2017, hal. 320-323)

Dalam artikel tersebut, bahwa dikatakan Tiongkok memiliki motif kedaulatan dalam konflik Laut China Selatan. Yang mendasari tindakan Tiongkok ialah atas dasar sejarah yang pernah ada di Tiongkok. Artikel tersebut memiliki kesamaan dalam membedah isu diatas dengan topik penelitian penulis yang menggunakan historis pada subjek yang ingin diteliti Yang mana juga, klasifikasi sektor sekuritisasi yang diungkap Buzan salah satunya sektor politik terdapat pembahasan kedaulatan..

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (LOSC) memuat tiga sistem penyelesaian perselisihan yang berbeda. Yang pertama perselisihan antara negara-negara pihak yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan LOSC. disebut sebagai sistem penyelesaian perselisihan umum dari LOSC, yang kedua, sistem penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan penambangan di Area berlaku tidak hanya untuk perselisihan mengenai LOSC tetapi juga untuk perselisihan tentang interpretasi dan penerapan

berbagai instrumen lainnya, yang terakhir perselisihan antara negara, melakukan perlindungan diplomatik atas nama orang alami atau ilegal (Churcill, 2017, hal. 216-238).

Buku ini menjelaskan Hukum Laut dari UNCLOS, ini dapat membantu jalan penelitian peneliti untuk mengkaji hukumnya dan atas dasar apa Malaysia membuat kebijakan tersebut.

Pada tahun 1998 *Water Negotiation* dikaitkan dalam bentuk pemulihan keuangan antara Singapura dan Malaysia yang kemudian disahkan untuk suatu pendekatan dalam bentuk untuk isu-isu bilateral yang luar biasa. Sangat sedikit liputan media yang melaporkan status negosiasi pada saat itu (Tortajada & Pobre, 2011, hal. 600-601).

Beberapa faktor, seperti memisahkan air bersih dari kesepakatan paket, harga air bersih dan hak Malaysia untuk meninjau harga air bersih, proses terhenti. Kesepakatan kemudian dibatalkan untuk pendekatan individual pada putaran ketiga pembicaraan pada bulan November 2002. Namun, tidak ada kesepakatan yang tercapai (Tortajada & Pobre, 2011, pp. 600-601).

Dalam jurnal tersebut menggunakan pendekatan media sebagai alat untuk menguraikan permasalahan terhadap kedua negara. Yang menyamakan dengan penelitian ini dimana isu tersebut dapat mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Karena kedua negara merasa mendapat ancaman antar satu sama lain.

1.7 Landasan Teori

Pendekatan *Security* pertama kali diungkapkan oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde. Buzan dkk mendeskripsikan keamanan tidak hanya pada konsep penggunaan senjata atau militer dalam upaya memiliki kekuasaan atau dalam masalah keamanan nasional. Keamanan merupakan suatu tindakan atau kebijakan yang menjadi isu utama permasalahan yang sedang dihadapi. Sifat khusus dari ancaman keamanan membenarkan penggunaan kekuatan yang luar biasa untuk menanganinya. Keabsahan dari keamanan sendiri, telah menjadi kunci untuk melegitimasi penggunaan kekuatan, tetapi pada umumnya membuka jalan bagi negara untuk memobilisasi, atau mengambil kekuasaan khusus, untuk menangani ancaman eksistensial (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 20-24).

Jawaban atas permasalahan isu keamanan global sendiri ialah pemahaman atas tentang arti keamanan itu sendiri. Dalam hal ini, keamanan diartikan sebagai cara bertahan hidup (Buzan, Waever, & de Wilde, Security, 1998, hal. 20-24).

Bagian ini merangkum teori keamanan kompleks "klasik" yang dikembangkan hingga 1991. Teori kompleks keamanan pertama kali dibuat sketsa oleh Buzan dalam edisi pertama "*People, States and Fear*" pada tahun 1983 (Buzan, Waever, & de Wilde, Security, 1998, hal. 12-13).

Penafsiran wilayah keamanan bermula dari fakta bahwa keamanan internasional adalah masalah relasional. Ini membahas secara kolektivitas terkait ancaman dari lingkungan alam. Salah satunya tujuannya adalah untuk menyediakan spesialisasi serta bahasa untuk konsep memfasilitasi

perbandingan di seluruh wilayah. Tujuan lain adalah untuk mengimbangi kecenderungan kekuasaan untuk meremehkan pentingnya masalah regional di internasional dalam urusan keamanan. (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 12-13).

Buzan dkk dalam bukunya "*A New Framework of Analysis*" Buzan mengkategorikan level dari isu *security*, yaitu, Sektor Militer, Sektor Lingkungan, Sektor Ekonomi, Sektor Sosial, dan terakhir Sektor Politik. Buzan juga menjelaskan bagaimana hubungan kelima sektor tersebut saling terhubung akan tetapi memiliki koridor masing-masing terhadap pemahamannya (Buzan, Waever, & de Wilde, Security, 1998, hal. 20-24)

Untuk dapat memahami klasifikasi sektor yang diuraikan Buzan dkk, lima sektor tersebut ada penjelasan masing-masing. Yang *pertama*, sektor militer, indikator-indikator di dalamnya ialah pada umumnya objek dari hal ini adalah negara dan juga mungkin identitas politik lainnya. Yang *mana* juga, penggunaan kekuatansuatu hal yang sah dalam penanganan masalah nasional atau kebijakan. Yang *kedua*, sektor politik, dalam hal ini yang termasuk indikator nya dimana sebuah konstitusi mendapat ancaman dari luar atau terhadap kedaulatan. Juga bisa tentang isu masalah ideologi. Kedaulatan suatu entitas negara bisa terancam dari hal apapun yang menyerang pemerintahan, kebijakan dll. Yang *ketiga*, sektor ekonomi, Perusahaan merupakan hal yang pada umumnya dapat sewaktu-waktu terancam dengan kata lain mengalami kebangkrutan. Akan tetapi, negara juga bisa mengalami hal yang sama jika kebutuhan masyarakat meninggi

dan negara tidak dapat menyanggupinya. Yang *keempat*, sektor societal, Buzan dkk mendefinisikan objeknya ialah suatu komunitas yang kolektif seperti negara atau kaum umat beragama. Dan yang *kelima*, sektor lingkungan, cakupan dari sektor ini cukup luas sama halnya dengan sektor sosial. Karena disini menyangkut kelangsungan hidup individual atau spesies seperti binatang dan manusia. Serta keberlangsungan peradaban dan *climate change* yang dipengaruhi tindakan manusia (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 20-24)

Penelitian menggunakan dua poin pendekatan keamanan milik Buzan dkk. Melalui dua klasifikasi sektor, yaitu politik dan ekonomi. Dalam sektor politik, dibahas tentang bagaimana kedaulatan menjadi isu penting disini. Kebijakan Malaysia dalam memperluas wilayah pelabuhan merupakan suatu bentuk pengukuhan kedaulatan maritim Malaysia atas Singapura. Malaysia mengklaim wilayah tersebut karena Malaysia merasa itu masih dalam territorialnya. Wilayah merupakan salah satu syarat suatu negara dapat berdiri, kedaulatan atas bangsanya sendiri.

Sedangkan dalam hal sektor ekonomi, poin yang dijelaskan oleh Buzan dkk, bahwa suatu negara dapat kolaps jika mengalami kemerosotan ekonomi. Maka dari itu, perlu adanya tindakan preventif yang harus dilakukan negara agar hal itu tidak terjadi. Tetapi disini, Buzan juga menjelaskan ada persaingan antar entitas baik perusahaan maupun negara dalam peningkatan ekonomi. Atas dasar itulah pemerintahan Malaysia mengklaim bahwa hal itu bertujuan agar lalu lintas perdagangan di

Pelabuhan Johor dapat lebih optimal. Asumsinya, Pelabuhan Johor dapat digunakan sebagai alternatif perdagangan internasional yang selama ini ada di Singapura untuk meningkatkan devisa negara melalui perdagangan.

Adapun tiga sektor lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini antara lain, lingkungan, militer dan sosial. Untuk poin pertama, dalam kebijakan pemerintah Malaysia tidak merusak atau tidak berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar pelabuhan. Buzan dkk mendefinisikan sendiri bahwa, adanya kerusakan ekosistem atau terganggunya suatu spesies baik manusia atau hewan termasuk ke dalam sektor lingkungan. Yang kedua, dalam realisasi kebijakannya, pemerintah Malaysia tidak menggunakan kekuatan militer apapun. Tidak bentuk-bentuk ancaman yang ditujukan terhadap Singapura maupun respon dari Singapura sendiri. Yang terakhir, kebijakan tersebut tidak menjadi isu utama dalam konflik Johor serta terhadap penduduk yang mendiami di sekitar Pelabuhan Johor Bahru.

1.8 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam Metode Penelitian Kualitatif. Metode ini disebut juga metode postpositivistik karena berlandaskan filsafat postpositivisme. Selain itu, disebut juga metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut juga metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di

lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Metode ini berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif (Sugiyono, 2015).

b. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek yang menjadi bahasan penelitian adalah Pemerintah Malaysia sebagai pemerintah yang mengambil sikap dan kebijakan dalam perluasan wilayah maritimnya.

c. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode Kajian Dokumen. Yang mana, dalam mengumpulkan data berasal dari dokumen-dokumen lama, film atau penelitian yang terkait dengan penelitian penulis.

d. Proses Penelitian

Dalam prosesnya, penulis akan memfokuskan terhadap kerangka teori, yang mana akan membantu banyak dalam menganalisa penelitian penulis.

BAB II

PENDEKATAN KEAMANAN SEKTOR POLITIK YANG

MEMPENGARUHI KEBIJAKAN MALAYSIA DI PELABUHAN

JOHOR

Bab ini akan menjelaskan apa yang mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Malaysia pada masa Mahathir Mohamad kembali naik menjadi Perdana Menteri melalui pendekatan konsep milik Buzan dkk. Buzan dkk bahwa sektor politik lebih menekankan kedaulatan negara yang mana ada dalam agenda militer sesuai dengan ancumannya. Tetapi, karena sektor militer memiliki bagian tersendiri, sektor politik lebih terfokus terhadap ancaman non-militer (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 140-143).

Dalam hal ini, Malaysia sebagai aktor politik merasa memiliki kepentingan nasional yang harus dicapai. Kedaulatan wilayah menjadi keutamaan untuk memperoleh kekuasaan yang absolut. Pelabuhan Johor merupakan wilayah strategis yang terletak di Selat Johor. Selat tersebut merupakan jalur perdagangan Malaysia. Dengan adanya kebijakan tersebut, tentunya menjadi sebuah keuntungan bagi Malaysia dalam lalu lintas perdagangan serta luas wilayah bertambah.

Dimulai dengan negara berdaulat, yang membentuk sebagian besar sektor politik, kita dapat melihat masalah ancaman dan kerentanan melalui argumen bahwa suatu negara terdiri dari tiga komponen: ideologi, bentuk fisik, dan institusi. Mengurangi masalah-masalah yang masuk ke dalam sektor lain (sebagian besar ancaman yang dibuat langsung dalam bentuk fisik harus militer, ekonomi atau lingkungan), kita dibiarkan dengan ideologi (kecuali identitas ideologi independen dari institusi) dan institusi sebagai pertanyaan dari ideologi di mana lembaga-lembaga politik dibangun (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 150-151).

Ideologi yang dimiliki negara secara bersama adalah bersifat nasionalisme, terutama nasionalisme sipil tetapi kadang-kadang ethno-nasionalisme dan ideologi politik. Dengan mengancam suatu ideologi, seseorang dapat mengancam stabilitas tatanan politik (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 150-151).

Ancaman seperti itu mungkin dengan struktur pemerintahan yang ada dengan mempertanyakan Ideologi yang melegitimasi terhadap integritas teritorial negara (mendorong pembelotan dari identitas negara) atau ke-keberadaan negara itu sendiri (dengan mempertanyakan haknya atas otonomi). Bagi negara, ada fokus pengorganisasian, untuk sebagian besar hal ini — kedaulatan. Ancaman yang ada pada suatu negara adalah mereka yang pada akhirnya melibatkan kedaulatan, karena kedaulatanlah yang mendefinisikan negara sebagai “negara”. Ancaman untuk

menyatakan ke-berlangsungan hidup (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 150-151).

Oleh karena itu ancaman terhadap kedaulatan. Bahkan pelanggaran kecil terhadap kedaulatan adalah ancaman, karena kedaulatan adalah prinsip yang mengklaim pada kekuasaan yang tertinggi hak pemerintahan sendiri. Dengan demikian, ia menjadi terancam jika menjadi parsial dalam arti apa pun. Apa pun yang bisa digambarkan sebagai Pelanggaran kedaulatan (intervensi) dapat disajikan sebagai masalah keamanan (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 150-151).

2.1 Faktor Ideologi

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Buzan menganggap pelanggaran hal sekecil apapun ialah ancaman bagi kedaulatan suatu negara. Ancaman tersebut bisa dalam bentuk intervensi dari entitas lainnya, kebijakan serta dalam bentuk militer yang penyelesaiannya menggunakan upaya politik. Buzan menganggap bahwa Ideologi merupakan suatu tatanan sosial yang kuat dan diperlukan dalam upaya pembangunan negara. Ideologi merupakan penyatuan dari keberagaman suatu kelompok sosial yang berada di satu kawasan. Maka dari itu, Ideologi harus mampu dipertahankan dan dilestarikan pemahamannya (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 150-151).

Pemerintah PAP telah bersusah payah untuk mempresentasikan prinsip meritokrasi dan pragmatismenya sebagai alternatif yang layak

untuk demokrasi liberal dan kompetisi multi-partai, kadang-kadang dengan menggambar dari gagasan yang beragam tentang nilai-nilai Konfusianisme dan budaya Asia untuk membangun benteng ideologis seperti "demokrasi Asia" terhadap kritik terhadap apa yang disebut liberal Barat. Dengan mengkredit demokrasi dan pragmatisme untuk menciptakan kondisi yang tepat untuk keberhasilan ekonomi, pemerintah PAP tidak hanya dapat membenarkan defisit demokrasinya (liberal), tetapi juga menghasilkan sumber daya ideologis dan struktur otorisasi untuk pemeliharaan rejim dominan satu partai. Dalam istilah 'pragmatis', kesuksesan ekonomi Singapura yang cukup besar adalah pembenaran yang cukup untuk sarana otoriterinya. Kepercayaan masyarakat secara keseluruhan terhadap prinsip-prinsip ini menciptakan kondisi untuk kepatuhan politik, penerimaan kebijakan yang tidak populer, dan sikap apatis politik, secara umum (Tan, 2011, hal. 69-72).

Institusi resmi pemerintahan perwakilan Singapura adalah warisan kolonial, yang secara fundamental didasarkan pada sistem pemerintahan parlementer Westminster. Di Singapura, eksekutif memiliki kekuatan lebih besar daripada legislatif. Secara teratur mengadakan pemilihan politik sejak tahun 1959, berjalan sesuai dengan sistem pemungutan suara pluralitas yang sederhana, sehingga PAP tetap berkuasa dan sejumlah kecil anggota parlemen dari parlemen yang terpilih sebagai oposisi (Tan, 2011, hal. 69-72).

Dengan mayoritas besar di parlemen, pemerintah PAP mampu mengubah konstitusi tanpa banyak halangan, memperkenalkan konstituensi multi-anggota, keanggotaan parlemen yang tidak dipilih, dan perubahan kelembagaan lainnya yang, pada dasarnya, memperkuat dominasi pemilihan pemerintah dan kontrol parlemen. Dengan incumbency, muncul keuntungan pemilihan umum yang telah mengamankan posisi PAP. Dari lokasi yang kuat ini, ia telah secara efektif menyebarkan gagasan bahwa lebih penting bagi negara kecil dengan sumber daya dan bakat yang terbatas untuk memiliki pemerintahan yang meritokratis, pragmatis, dan berorientasi ekonomi daripada yang pada akhirnya dibatasi oleh prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan check and balance. Gaya pemerintahan Singapura yang otoritarian serta kapitalis ini adalah alasan Singapura menjadi negara yang kuat seperti saat sekarang (Tan, 2011, hal. 69-72).

Kesadaran untuk mewujudkan perpaduan masyarakat di negara seperti di Malaysia ini adalah tanggung jawab yang berat. Teras utama untuk mewujudkan perpaduan masyarakat Malaysia adalah untuk menyadari bahwa manusia itu dijadikan Allah SWT berbangsa-bangsa, berkaum-kaum, bersuku-suku dan sebagainya. Hakikat ini adalah sebenarnya untuk menambahkan nilai-nilai kehidupan, saling mempelajari, saling berinteraksi, dan saling bertolak belakang. Namun, manusia akan menggunakan perbedaan ini untuk mencetuskan konflik. Dengan begitu, Rukun Negara yang dibentuk oleh pimpinan Malaysia

adalah untuk mengatasi segala perbedaan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Oleh itu, unsur-unsur yang terkandung dalam Rukun Negara tidak menampakkan hak milik suatu golongan. Ia bersifat umum dan mencoba untuk membina lingkaran yang luas, sehingga pada titik akhirnya dapat mengatur tata kelakuan, mengendalikan, dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan yang sebenarnya bercirikan Malaysia (Aziz, 2010, hal. 447-449).

Ketika Malaysia memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957, Cina pindah untuk membangun hubungan diplomatik, tetapi Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman menolak karena dukungan China untuk Partai Komunis Malayan (MCP). Malaysia dan Inggris baru saja muncul dari lebih dari satu dekade pertempuran MCP di pemberontakan yang dikenal sebagai Darurat. Karena mayoritas MCP adalah etnis Cina pada saat populasi Malaysia sekitar 50 persen Melayu, 45 persen Orang Cina, dan 5 persen orang India, etnis dan ideologi tumpang tindih untuk menghasilkan persepsi tentang Cina sebagai ancaman (Noor & Qistina, 2017, hal. 201-202).

Tawar-menawar besar yang telah dilanda kemerdekaan untuk mempertahankan stabilitas politik di masyarakat majemuk Malaysia memberikan kewarganegaraan etnis Tionghoa sebagai imbalan atas pengakuan supremasi politik Melayu dan janji untuk tidak menantang. Campur tangan Cina dalam politik Malaysia yang dipadukan dengan persepsi ambisi ekspansionisnya di Asia membuat para pemimpin Melayu

seperti Tunku memandang Cina sebagai ancaman eksistensial (Noor & Qistina, 2017, hal. 201-202).

Lima prinsip Rukun Negara yang diwujudkan ini adalah dibentuk berdasarkan acuan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama. Prinsip-prinsip yang terbina ini adalah bagi memperkukuhkan perpaduan kaum (Aziz, 2010, hal. 447-449).

a) Kepercayaan kepada Tuhan

Agama dijadikan pegangan utama rakyat Malaysia kerana ketiadaan agama boleh meruntuhkan keperibadian seseorang, sesuatu bangsa dan juga negara. Pegangan yang kukuh terhadap agama akan dapat menahan seseorang itu daripada melakukan jenayah dan juga kejahatan. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam ialah agama rasmi Persekutuan, tetapi agama dan kepercayaan-kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman.

Menyedari betapa pentingnya keteguhan pegangan anggota masyarakat terhadap ajaran agama masing-masing, prinsip ini telah dipilih sebagai prinsip pertama dalam Rukun Negara (Aziz, 2010, hal. 447-449).

b) Kesetiaan Kepada Raja dan Negara

Malaysia mengamalkan Sistem Demokrasi Parlemerter dan Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong

sebagai Ketua Negara dan sistem beraja juga diamalkan di setiap negeri, dan Yang di-Pertua Negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja. Seri Paduka Baginda, Raja-Raja dan Yang di-Pertua Negeri adalah merupakan lambang perpaduan rakyat. Maka setiap warganegara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka bermastautin tanpa mengurangkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong (Aziz, 2010, hal. 447-449).

c) Keluhuran Perlembagaan

Prinsip ini menekankan kewajiban rakyat untuk menerima, dengan mematuhi lalu berupaya untuk mempertahankan keluhuran atau kemuliaan Perlembagaan Negara.

Perlembagaan Negara adalah sumber perundangan yang tertinggi. Fungsinya untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warganegara.

Setiap warga negara Malaysia dikehendaki menghormati, menghargai lalu memahami maksud dengan kandungan nilai yang ada didalamnya serta latar belakang sejarah pembentukan Perlembagaan Negara (Aziz, 2010, hal. 447-449).

d) Kedaulatan Undang-Undang

Keadilan diasaskan atas kedaulatan undang-undang di mana setiap rakyat sama tarafnya di sisi undang-undang negara. Undang-undang negara berasaskan kepada Perlembagaan. Oleh itu kedaulatannya perlu diterima dan dipertahankan. Tanpa undang-undang, hidup bermasyarakat dan bernegara tidak aman dan stabil. Oleh itu undang-undang negara dijamin pula oleh institusi kehakiman yang bebas dan berwibawa. Tuntutan kepada prinsip keempat ini adalah supaya kita sama-sama menghormati undang-undang dan berusaha menyokong penguat kekuasaannya serta memelihara kedaulatannya (Aziz, 2010, hal. 447-449).

Menurut Buzan, ancaman politik ditujukan pada stabilitas organisasi negara tujuannya dapat berkisar dari menekan pemerintah pada kebijakan tertentu, melalui penggulingan pemerintah, untuk memicu pemisahan diri, dan mengganggu tatanan politik negara sehingga melemahkannya sebelum militer menyerang. Gagasan negara, terutama identitas nasionalnya dan pengorganisasian ideologi, dan lembaga yang mengungkapkannya adalah hal yang normal target ancaman politik. Karena kehidupan negara merupakan entitas yang pada dasarnya politis, ancaman politik mungkin sama takutnya dengan ancaman militer, khususnya jadi jika, targetnya adalah keadaan lemah. Ini menunjukkan bagaimana mungkin mendefinisikan keamanan politik tetapi juga bagaimana sulit untuk membatasi, terutama dalam kaitannya dengan masyarakat dan militer keamanan, sosial ditunjukkan oleh

penyebutan identitas nasional, dan militer sangat jelas di seluruh (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 142).

Biasanya, ancaman politik adalah tentang memberi atau menolak pengakuan, dukungan, atau legitimasi (yang menjelaskan mengapa dimungkinkan untuk memiliki murni ancaman politik yaitu, ancaman yang tidak menggunakan militer, ekonomi, atau lainnya, berarti dari sektor lain, kata-kata penting dalam kaitannya dengan pengakuan dan tuntutan politik terkait. Di mana sesuai dengan tindakan Malaysia yang menerapkan ideologinya yaitu Rukun Negara secara tegas yang terdapat prinsip-prinsip di dalamnya. Juga menurut Buzan, agar tercapai suatu kepentingan nasional harus adanya kekuatan dalam ideologinya yang mana penerapan aspek dalam nilai yang terkandung tidak dapat dipatahkan. Rukun Negara sendiri bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu, tanpa mengucilkan suatu kaum serta bersikap saling menghormati antara satu sama lain. Melalui perpaduan yang mapan akan dapat membantu negara meningkatkan dan mempergiatkan pertumbuhan ekonomi, mengekalkan kestabilan politik dan sistem pemerintahan negara yang demokratik. (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 142).

Malaysia dan Singapura merupakan dua negara berbeda dalam bentuk perpolitikannya juga dengan ideologinya. Malaysia, dengan ideologi Rukun Negaranya telah merepresentasikan demokrasi ala Malaysia sendiri yang berpegang teguh terhadap agama, adat,

pemerintah dll. Sedangkan Singapura, Hasil dari buah tangan bapak pendiri mereka yaitu Lee Kwan Yew adalah suatu kesuksesan yang luar biasa. Beliau mampu menggabungkan pemerintah yang otoritarian dengan ekonomi yang kapitalis. Namun, hal itu menjadi suatu masalah tersendiri bagi Singapura karena kebebasan politik yang minim membuat oposisi menjadi lemah dan tak mampu untuk melawan (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 142).

Singapura, yang pada awalnya adalah suatu wilayah yang berada di ujung selatan hanyalah sebuah kota pelabuhan yang dijadikan oleh Kerajaan Inggris. Mereka tergabung dengan Malaysia karena sesama dijajah kolonial Inggris. Namun setelah kolonial pergi dan Singapura memisahkan diri dengan Malaysia menimbulkan masalah serius bagi perekonomian serta hubungan politik mereka dengan Malaysia.

Maka dari itu, bagi Malaysia, protes keras yang ditujukan terhadap mereka oleh Singapura dapat mengganggu keamanan ideologi serta kedaulatan Malaysia sendiri. Protes tersebut jika Malaysia

mengabaikannya akan berbuntut panjang dalam situasi polugri kedua negara khususnya Malaysia. Pembentukan kebijakan itu ialah hasil dari konsep ideologi mereka yang demokratis demi kepentingan rakyat.

Seperti yang telah dipaparkan oleh Buzan dkk, bahwa, ancaman sekecil apapun terhadap suatu ideologi negara merupakan suatu ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Yang mana, dalam hal ini perlu adanya penyelesaian masalah secara cepat. Karena, jika tidak

ditangani secara cepat dan tepat, akan mengganggu keutuhan negara serta membuat masyarakat merasa was-was jika sewaktu-waktu negara dapat runtuh (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 150-151).

2.2 Faktor Institusi

Ancaman terhadap sebuah institusi sebuah negara dengan kata lain sebuah pemerintahan menurut Buzan ialah adanya ancaman integritas teritorial negara (adanya pembelotan terhadap identitas negara), atau eksistensi negara itu sendiri (dengan mempertanyakan haknya atas otonomi). Sebagaimana telah dibahas, ancaman politik membawa maju salah satu dari subversi legitimasi atau penolakan pengakuan (baik penolakan total atau penolakan kesetaraan kedaulatan) (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 150).

Pada tanggal 25 Oktober 2018, Malaysia mengeluarkan kebijakan perluasan wilayah pelabuhan Johor Bahru melalui Federal Government Gazette yang ditandatangani oleh Menteri Transportasi Malaysia Loke Siew Fook (Reuters, 2018).

Kebijakan ini di protes keras oleh Singapura. Menurut Singapura, rencana itu akan memasuki wilayah negara kota tersebut. Pernyataan itu menjadi perkembangan terbaru pertikaian atas oleh kedua negara atas Selat Singapura. Pemerintah Singapura juga menuturkan bahwa kapal-kapal Malaysia sering memasuki perairan Singapura di lepas pantai Tuas tanpa izin semenjak kebijakan tersebut di keluarkan. Pemerintah Singapura tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap

tindakan tersebut dan siap menyelesaikan masalah secara damai dengan hukum internasional (Reuters, 2018).

Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke Siew Fook, menyebut bahwa klaim Singapura terhadap wilayah tersebut tidak akurat. Dia mengatakan perubahan tersebut tidak mengambil wilayah dari Singapura. Batas-batas pelabuhan Johor Bahru masuk dalam wilayah perairan Malaysia dan ini adalah hak Malaysia untuk membuat batas-batas pelabuhan di wilayah perairan kami, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia (Reuters, 2018).

Malaysia terlihat berupaya mengedepankan kepentingan nasionalnya di sini dengan menyangkal klaim Singapura terhadap wilayah yang dianggap milik Singapura. Malaysia tetap mempertahankan wilayahnya atas dasar kedaulatan nasional. Upaya politik pun juga ditempuh oleh Malaysia dalam konflik dengan Singapura. Kedua Menlu negara yaitu Saifudin Abdullah dari Malaysia dan Vivian Balakrishnan dari Singapura sepakat menjalani Dialog dalam situasi kondusif pada bulan Januari 2019. Hasil dari pertemuan dari kedua negara itu didapat bahwa Malaysia menyetujui penangguhan larangan melintas bagi pesawat sipil yang selama ini diterapkan pada wilayah Pasir Gudang dalam waktu dekat. Serta Singapura, sepakat menangguhkan penerapan prosedur Sistem Instrumen Pendaratan (ILS) yang berlaku di bandara Seletar, hasil tersebut berlaku dalam satu bulan kedepan. Kedua negara juga sepakat membentuk kelompok bersama

demi membahas dan mempelajari masalah aturan serta operasional terkait sengketa perairan juga akses pelabuhan (CNN Indonesia, 2019).

Tindakan Malaysia tersebut, menurut Buzan dkk dijelaskan dalam bukunya, bahwa dalam sektor politik memungkinkan penyelesaian masalah politik tanpa penggunaan kekuatan militer. Juga tanpa mengancam keberlangsungan lingkungan, sosial serta ekonomi. Disini negara, memperkuat otoritasnya masing-masing dalam hubungan luar negerinya (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 141-143).

Pada perdebatan antara Weber dan Laclau akan menjelaskan bagaimana tindakan Malaysia dalam penerapan faktor institusi. Perlu adanya elaborasi dalam pemahaman politik itu sendiri. Yang menjadi kontroversi dalam perdebatan ini ialah dalam mengidentifikasi politik dengan stabilisasi politik atau ketidakstabilan politik. Maksudnya disini, apakah dalam prakteknya, politik dilihat menurut situasi terkini yang terjadi. Satu pihak lainnya dalam perdebatan ini, melihat politik sebagai alat untuk mengamankan kepentingan atau kebijakan sebuah institusi atau negara dan untuk kestabilan sebuah otoritas. Ketika kebijakan yang diberikan bersifat permanen, itulah hasil yang dicapai dalam hubungan politik. Sedangkan Laclau secara garis besar melihat politik sebagai upaya bentuk Politisasi atau Sekuritisasi. Malaysia dalam hal ini, menerima ajakan Singapura untuk berdiskusi, membentuk kelompok bersama serta pertemuan kedua Menlu merupakan upaya mempertahankan aturan atau kebijakan yang mereka buat yang mana

ditentang Singapura. Kebijakan tersebut “diamankan” dengan adanya penangguhan kebijakan (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 141-143).

2.3 Faktor Bentuk Fisik (Wilayah)

Malaysia tidak cocok disebut sebagai Negara Maritim. Wilayah laut yang mereka miliki tidaklah luas. Oleh karenanya, Malaysia sangat menyadari hal itu dan tidak ingin kehilangan sekecil apapun dari maritimnya. Kebijakan tersebut menegaskan wilayah kedaulatan maritim Malaysia. Mengacu pada kasus lalu bersama Singapura terkait kepemilikan Pedra Branca yang dimenangkan Singapura di ICJ (Affairs, 2019).

Buzan sendiri mengatakan kedaulatan negara merupakan asas terpenting terjaganya keutuhan sebuah negara. Negara dapat dikacaukan oleh konflik kedaulatan atau wilayah. Kedaulatan sendiri merupakan salah satu terbentuknya suatu negara. Seperti yang terdapat dalam "Security Agenda", aktor eksternal mungkin sering bertujuan mengganggu dari kedaulatan dalam tindakan suatu negara, tetapi logika dalam sekuritisasi yang berkemungkinan akan terjadi akan tetap fokus pada kedaulatan (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 150-152).

Dalam beberapa kasus, Dunia internasional dapat melegitimasi intervensi dengan mengacu pada genosida, agresi, atau, semakin, hanya kekurangan "good governance". Dalam kasus seperti itu, sekuritisasi ganda sedang dimainkan. Itu Pemerintah pasti akan memprotes karena

kedaulatannya telah dilanggar (bukan dengan mencoba memperdebatkan haknya untuk melakukan genosida tetapi dengan mengklaim hak untuk melakukan apa pun yang diputuskan di dalam negeri). Di sisi lain, dunia internasional akan bertindak dengan mengacu pada beberapa prinsip yang diduga telah dilanggar; karena pelanggaran kedaulatan dan non-intervensi suatu langkah drastis ke sistem state modern, aktor yang melakukan intervensi akan melakukannya harus membuat daya tarik yang kuat dan luar biasa (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 150-152).

Dalam kasus ini, faktor wilayah cukup mempengaruhi eskalasi dari konflik tersebut. Batas-batas wilayah antara Malaysia dan Singapura merupakan peninggalan kolonial Inggris. Kedua negara sering terlibat dalam konflik wilayah. Wilayah selatan Malaysia yaitu Johor memiliki jarak yang cukup dekat dengan Singapura. Perbatasan kedua negara di wilayah ini dianggap rawan terhadap konflik. Protes dari Singapura merupakan suatu respon yang wajar. Mengingat, juga sudah ada perjanjian mengenai wilayah ini antar kedua negara. Untuk itu, menurut Buzan, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bentuk fisik atau wilayah. "Good Governance" dapat mempengaruhi keamanan dari wilayah atau kedaulatan suatu negara. Tatanan politik serta pengelolaan pemerintah yang kuat dapat menjaga suatu negara terhadap ancaman wilayah yang ditujukan untuk mengganggu stabilitas keamanan (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 152)

Selain itu, dunia internasional juga dapat mempengaruhi dari keamanan suatu wilayah negara. Dunia internasional yang dimaksudkanialah seperti organisasi yang terdiri atas negara atau negara itu sendiri, seperti intervensi PBB dalam penanganan masalah Israel-Palestina. Dalam kasus Johor ini, jika konflik tersebut tidak terselesaikan, kedua negara dapat mengajukan kepada ICJ sebagai institusi hukum internasional tertinggi. ICJ akan menjadi pihak ketiga dalam penyelesaian konflik Johor (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 152).

Tabel 2.1 Rangkuman dari Analisis berdasarkan konsep pendekatan keamanan milik Buzan

No	Indikator	Sikap Malaysia
1	Ideologi	Mempertahankan Kebijakan perluasan wilayah tersebut karena merupakan hasil dari konsep negara Malaysia yaitu Rukun Negara.

2	Bentuk Fisik (Wilayah)	Penerapan kebijakan perluasan wilayah tidak dibatalkan. Ditangguhkan untuk sementara sampai konflik selesai.
3	Institusi	Mengadakan hubungan kerjasama dengan Singapura untuk menyelesaikan konflik.

Diolah dari buku Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde.

Dapat disimpulkan, berdasarkan penjabaran melalui konsep Buzan, Ideologi, Institusi, dan Bentuk Fisik di dapat beberapa tindakan Malaysia terhadap konflik tersebut. Kebijakan perluasan wilayah tersebut merupakan hasil dari konsep negara Malaysia yaitu Rukun Negara. Lalu. Penerapan kebijakan perluasan wilayah tidak dibatalkan, ditangguhkan untuk sementara sampai konflik selesai. Yang terakhir, Mengadakan hubungan kerjasama dengan Singapura untuk menyelesaikan konflik. Untuk bab selanjutnya akan masuk kedalam pembahasan dalam sektor keamanan ekonomi.



BAB III

PENDEKATAN KEAMANAN SEKTOR EKONOMI DALAM KEBIJAKAN MALAYSIA TERHADAP PELABUHAN JOHOR

Menurut Barry Buzan dkk, tujuan utama dalam keamanan ekonomi, dipetakan sebagai isu yang tidak terselesaikan dan dibutuhkan perdebatan yang cukup serius tentang dalam hubungan internasional terhadap hubungan antara struktur politik yang anarki dan sistem ekonomi pasar. Dalam Merkantilisme dan Neo-merkantilism, meletakkan politik sebagai pemecah masalah dalam isu ekonomi. Serta, melihat bagaimana

posisi negara dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya. Negara, harus ikut turun tangan dalam isu ekonomi. Kebijakan pasar haruslah diatur oleh negara. Lain halnya dalam Liberalisme, meletakkan ekonomi sebagai akar dalam perdebatan tatanan sosial. Serta, membiarkan pasar untuk sebebannya mengatur kebijakan tanpa adanya intervensi dari negara.

Negara dibutuhkan dalam pembuatan hukum dan menjaga keamanan politik-militer serta mendukung tatanan sosial yang mana pasar tidak mampu melakukannya. Sedangkan para sosialis, memperdebatkan ekonomi adalah akar masalah tatanan sosial. Tujuan mereka ialah membuat ekonomi berlandaskan sosial dan politik untuk mencapai keadilan dan kesetaraan. Yang pada umumnya, “yang lemah melawan yang kuat” (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 95-96)

Sektor ekonomi memiliki keberagaman aktor mulai dari individu, subsistem hingga, negara. Gagasan tentang keamanan ekonomi sendiri banyak diperdebatkan dalam ekonomi politik serta struktur ekonomi pasar. Hal ini pun menjadikan suatu perbedaan pandangan mengenai hal tersebut. Seperti yang dijelaskan ada gagasan ekonomi dari merkantilisme, liberal dan sosialis. Ketiga gagasan tersebut memiliki pandangan yang berbeda mengenai masalah ekonomi serta tujuan dari sekuritisasi ekonomi (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 95).

Ada keberagaman isu-isu yang ada pada keamanan ekonomi. Isu-isu yang dapat memunculkan masalah terhadap suatu negara yaitu antara lain, mempertahankan produksi militer di pasar global, investasi yang buruk,

perdagangan illegal, dan ancaman globalisasi ekonomi jika menimbulkan efek negatif daripada mendapatkan keuntungan (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 98).

2.2 Ancaman dan Kerentanan Ekonomi

Apa yang merupakan ancaman ekonomi eksistensial tergantung pada obyek referensi. Bagi individu, keamanan ekonomi paling dapat dipahami jelas dalam hal kebutuhan dasar manusia. Individu hidup atau mati sesuai dengan ketentuan kebutuhan dasar untuk mempertahankan kehidupan manusia: makanan, air, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan yang memadai. Apa yang disebut ketahanan pangan dan seruan untuk memberantas kelaparan massal jelas dalam bidang kebutuhan dasar manusia, seperti halnya bantuan bencana. Tapi di luar dasar-dasar ini, tidak jelas bahwa individu dapat secara sah di sekuritisasi di sektor ekonomi. Masalah tingkat kesejahteraan relatif, diferensial akses ke sumber daya yang lebih eksotis, dan bahkan pengangguran mungkin sangat penting bagi individu dan memang bagi masyarakat, tetapi dalam sektor ekonomi bukanlah tentang bagaimana cara bertahan hidup. Ancaman dari sektor ekonomi ini dapat terjadi jika suatu negara mengedepankan kebutuhan ekonomi berdasarkan kesejahteraan masyarakatnya (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 104-106).

Dalam perspektif liberal, perusahaan, seperti yang dibahas sebelumnya, umumnya kurang memiliki kualitas eksistensial yang

diperlukan untuk sekuritisasi ekonomi kecuali, seperti halnya dengan bank-bank besar, kehancurannya mengancam perekonomian itu sendiri. Kata keamanan sering digunakan dalam hubungan ekonomi, terutama dalam kaitannya dengan investasi. Investasi memiliki risiko ekonomi dan politik (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 103-105).

Dewasa ini, efek yang ditimbulkan oleh investasi bukanlah ancaman ideologis negara lebih terhadap potensi perselisihan sipil. Risiko politik lain yang bersifat tetap sebagai boikot kolektif. Investor di Libya dan Irak telah kehilangan uang sebagai akibat boikot ekonomi internasional (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 103-105).

Tidak seperti perusahaan, negara memiliki kemampuan yang diperlukan untuk sekuritisasi. Mereka diharapkan memiliki struktur yang kuat, berakar dan permanen. Fakta bahwa negara dipandang tidak dapat *collapse* menyebabkan masalah ialah peran mereka sebagai aktor dalam ekonomi global (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 103-105).

Sedangkan perusahaan akan bangkrut dan bubar jika mereka tidak dapat memainkan peran mereka sebagai aktor ekonomi, negara tidak bisa bubar. Negara secara teknis bisa bangkrut (seperti halnya dengan Meksiko selama krisis utang dan hampir lagi pada tahun 1995), tetapi mereka tidak dapat dibubarkan, dan penghuninya tidak bisa dipecat, walaupun banyak yang mencoba bermigrasi (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 103-105).

2.3 Sistem Ekonomi

Salah satu fitur menarik dari sektor ekonomi adalah tingkat sistem itu struktur (pasar, sistem perdagangan, sistem keuangan) dan institusi yang terkait dengan sebagai objek keamanan. Ini berbeda dengan wacana di sektor politik, di mana, meskipun berbagai rezim dan institusi dan bahkan masyarakat internasional sendiri dapat melakukannya sebagai menjadi objek referensi. Struktur anarkis yang seperti itu hampir tidak pernah dibuat dengan cara ini (meskipun obsesi dengan kedaulatan menyiratkan dukungan untuk struktur anarkis) (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 106).

Sejak tahun 1963, Malaysia telah mempunyai dua sistem ekonomi yang berbeda. yaitu sistem Sara Diri dan Sistem Komersil. Sistem Sara Diri adalah kegiatan ekonomi dari kemampuan pemenuhan kebutuhan sehari-harinya sendiri melalui kegiatan berkebun dan bercocok tanam, perikanan dan kehutanan. Lain halnya dengan sistem Komersil ialah sistem ekonomi yang mengacu pada prinsip pasar terbuka layaknya penanaman modal, investor asing, teknologi baru, pengenalan jenis tanaman baru, dan sebagainya (Ramadani, 2018).

Dalam prekonomian Malaysia, peran pemerintah minim dalam penerapannya sehingga menjadikan mudah dalam hal birokrasi. Banyak pengusaha dari negara-negara lain yang ingin melakukan bisnis di Malaysia karenanya. Imbasnya, hal tersebut mampu mengurangi tingkat pengangguran masyarakat dan menaikkan pendapatan nasional. Kemajuan

teknologi juga berperan dalam mempercepat pembangunan infrastrukturnya. Itulah yang menjadikan perekonomian Malaysia tumbuh dengan pesat (Ramadani, 2018).

Kebijakan Malaysia ini diharapkan memudahkan dalam hal mobilisasi ekonomi serta integrasi ekonomi yang tercipta mampu meningkatkan taraf perekonomian Malaysia. Malaysia dapat dipandang sebagai salah satu negara berkembang yang luar biasa di kawasan Asia Tenggara. Malaysia telah mempraktikkan kebijakan liberal terhadap arus masuk modal asing dan keterbukaan sejak 1957. Ditambah dengan kebijakan yang terkelola dengan baik, perekonomian Malaysia secara bertahap telah berubah dari ekonomi berbasis pertanian menjadi ekonomi multi-sektor dan ekonomi yang didorong oleh ekspor (Tang, Cheam, & Ong, 2015, hal. 1-2).

Menurut Global Competitiveness Report 2012-2013, Malaysia adalah negara pengekspor *tier-one*. Sebagai contoh, indeks ukuran pasar asing menunjukkan bahwa Malaysia berada di urutan ke 20 dari 144 negara pengekspor yang sedang ditinjau. Demikian juga, berdasarkan pangsa ekspor dalam PDB, Malaysia berada di peringkat 10 dari 144 negara pengekspor. Kedua indikator tersebut secara konsisten menandai Malaysia sebagai ekonomi berorientasi ekspor yang mengesankan. Kebijakan perluasan wilayah pelabuhan ialah menjadi bukti bahwa Malaysia serius dalam urusan ekspor-impor mereka (Tang, Cheam, & Ong, 2015, hal. 1-2).

Sesuai menurut pernyataan Buzan, Di atas itu semua, diharapkan dinamika ekonomi kontemporer keamanan akan didominasi oleh kecenderungan globalisasi yang kuat. Tidak seperti hubungan militer dan politik, hubungan ekonomi saat ini sedikit dipengaruhi oleh keadaan geografis serta jarak. Biaya di seluruh dunia pengiriman dan komunikasi saat ini sangat rendah, dan di banyak perusahaan besar yang bergerak secara global (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 95-117).

Banyak pasar, khususnya keuangan yang sekarang beroperasi secara global dan tidak lagi secara berlebihan didiskusikan dalam sistem ekonomi global. Memang, beberapa pengamat melihat pengembangan pembagian kerja skala global yang cukup maju untuk menjadi meringgirkan negara sebagai aktor ekonomi yang sentral (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 95-117).

Karena sifat hubungan ekonomi di bawah liberalisme, ekonomi keamanan adalah subjek yang sangat sulit. Kesulitan ini sebagian harus dilakukan dengan kualitas instrumental unit ekonomi dan rasa tidak aman yang melekat hubungan pasar dan sebagian dengan konsekuensi yang luas dan substansial kegiatan ekonomi di sektor lain (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 95-117).

Perluasan wilayah Pelabuhan Johor ini, agar memudahkan jalur transportasi baik perdagangan maupun mobilisasi penduduk. Ini merupakan contoh dari efek dari liberalisasi. Keterbukaan terhadap dunia luar menuntut adanya sarana dan prasarana yang baik maupun tatanan ekonomi

yang kuat. Ekspor-Import yang merupakan devisa tertinggi Malaysia, membuat pemerintahannya harus mencari cara bagaimana perekonomian Malaysia stabil melalui perdagangan ekspor-import tersebut (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 95-117).

2.4 **Tren Globalisasi**

Kemunculan dan intensifikasi ekonomi pasar global adalah satu dari perkembangan utama zaman kita, dan pertanyaan keamanan yang muncul adalah tentang stabilitas jaringan yang kompleks ini kompetitif dan kolaboratif hubungan.

Sudah lama ada perdebatan tentang destabilisasi yang akan datang tentang tatanan ekonomi internasional liberal akibat turunya pamor Amerika Serikat sebagai hegemonik pemimpin (Hirsch dan Doyle 1977; Keohane 1980, 1984; Strange 1984; Gilpin 1987; Kindleberger 1981).

Dengan berakhirnya Perang Dingin, perdebatan ini terjadi diambil pada Leninis, yang ironis dengan kemungkinan bahwa penghapusan ketakutan mereka bersama terhadap komunisme dan kekuatan Soviet akan menyebabkan pusat-pusat utama kekuatan kapitalis yang jatuh ke dalam krisis persaingan antar individu.

Globalisasi ekonomi yang efisien ini baik untuk konsumen, tetapi itu menempatkan tekanan adaptasi yang luar biasa pada negara dan masyarakat, yang harus terus mengkonfigurasi ulang cara mereka mencari nafkah. Para ekonom paham liberal tampaknya terlalu mudah untuk

dilupakan, untuk menjadi konsumen harus menghasilkan sesuatu untuk diperdagangkan atau dijual.

Di daerah maju yang lebih tua seperti Eropa, persaingan perdagangan yang semakin intensif menghadapi negara-negara dan masyarakat-masyarakat dengan pertanyaan mayor tentang nilai-nilai sosial dan politik (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 95-117).

Retorika Mahathir, utamanya terhadap China, telah membuat investor gelisah atas masa depan sejumlah proyek besar, termasuk pembangunan perumahan di selatan negara itu. Namun pada saat yang sama dengan tetap berpegang pada peringatannya tentang 'versi baru kolonialisme', pemimpin berusia 93 tahun ini juga mengatakan terbuka untuk investasi yang menguntungkan perusahaan dan pekerja lokal. Hal itu mencerminkan keseimbangan yang harus dihadapi Mahathir, antara menenangkan publik yang khawatir tertinggal keuntungan finansial dari proyek-proyek infrastruktur dan realita kebutuhan anggaran untuk pendapatan (Andriani, 2018).

Malaysia telah menanggukkan proyek East Coast Rail Link senilai US\$20 miliar yang didukung oleh China Communications Construction Co. Mahathir juga telah membatalkan tiga proyek pipa gas senilai US\$3 miliar, dua di antaranya terkait dengan unit China National Petroleum Co. Ini mencerminkan suatu sikap proteksionisme dari Mahathir di era globalisasi. Namun, di satu sisi, perluasan kebijakan wilayah pelabuhan adalah bertujuan untuk memudahkan jalur lintas perdagangan ekspor-

impor yang mana hal tersebut mencerminkan mobilisasi dari globalisasi (Andriani, 2018).

Di era globalisasi saat ini, kemudahan serta tak ada jarak antar negara membuat hal positif bagi perekonomian. Perkembangan teknologi serta sarana-pra sarana menjadi penunjang. Malaysia di sini walaupun menanggukkan beberapa proyek tetapi tidak menghentikannya. Hanya ingin melihat lebih dalam lagi seberapa penting proyek-proyek tersebut. Karna perlu adanya pengawasan yang ketat agar hasilnya tepat sasaran. Hal tersebut bukan berarti Malaysia menolak globalisasi, kebijakan perluasan wilayah pelabuhan Johor, merupakan alasan untuk memudahkan mobilisasi kapal laut dagang Malaysia ataupun kapal asing yang ingin berlabuh di sana. Ini merupakan alasan untuk Malaysia memudahkan perdagangan ekspor-impor maupun untuk kapal penumpang.

Perluasan wilayah Pelabuhan Johor tersebut merupakan contoh dari efek globalisasi. Di mana negara-negara dituntut untuk lebih terbuka serta memberikan kemudahan dalam investasi serta mobilisasi penduduk. Seperti yang telah Buzan jelaskan bahwa, globalisasi ekonomi yang efisien ini baik untuk konsumen, tetapi itu menempatkan tekanan adaptasi yang luar biasa pada negara dan masyarakat, yang harus terus mengkonfigurasi ulang cara mereka mencari nafkah (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 95-117).

2.5 Dinamika Regional

Regionalisasi datang dalam berbagai bentuk integrasi, dengan berbagai tingkat identitas, kedalaman, dan pelebagaan. Mungkin perbedaan utama adalah bahwa antara versi formal, yang terikat dengan aturan, dan memiliki lembaga seperti EU dan versi informal yang dipimpin oleh "proses yang tidak diarahkan melalui interaksi sosial dan ekonomi" seperti yang terjadi di Asia Timur. Seperti halnya level global, level regional dapat di sekuritisasi sendiri atau dapat tumpang tindih dengan sekuritisasi di tingkat negara bagian dan individu. Perdebatan tentang Uni Moneter Eropa memiliki tumpang tindih kualitas.

Rendahnya biaya transportasi dan komunikasi membuat tak terbanding rasa antusiasme terhadap regionalisme ekonomi yang terlihat aneh pada awalnya. Mengingat mobilitas intrinsik memiliki banyak faktor ekonomi (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 112-113).

Dengan demikian, logika regionalisme dari ekonomi dapat dilihat terutama sebagai respons terhadap ancaman *top-down* dari kerangka dominan globalisasi, meskipun, seperti halnya EU, logika *bottom-up* yang signifikan juga mendukungnya. Selama regionalisme ekonomi tetap liberal dalam pandangannya, kedua perkembangannya akan tetap kompatibel. Berbeda dengan situasi di tahun 1930-an, paling kontemporer wilayah yang berada dalam satu regional memiliki struktur perdagangan internal yang cukup liberal dan terbuka dalam banyak hal untuk pasar dunia (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 113-114).

Tujuan dari regionalisasi ekonomi adalah untuk mengurangi tekanan ekonomi global tanpa harus mengorbankan semua sektor dalam perekonomian dalam skala yang besar dan untuk mencoba mengurangi tuntutan manajemen yang berlebihan pada suatu ekonomi global dengan memindahkan banyak dari tuntutan itu ke dalam skala regional.

Secara ekonomi, struktur perdagangan adalah upaya untuk membangun platform operasi yang lebih kuat dan untuk lebih terlibat ke dalam perdagangan yang ketat dan persaingan finansial di pasar global. Dan mereka membentengi cadangan perekonomian jika ekonomi liberal global runtuh karena efek manajemen yang lemah, adanya turbulensi keuangan, atau meningkatnya persaingan perdagangan. Bagian dari fungsi ini adalah tentang keamanan ekonomi, sisanya adalah tentang mencari keuntungan dalam logika persaingan ekonomi-politik dalam pasar global (Buzan, Waeber, & de Wilde, 1998, hal. 113-114).

Melalui penjabaran di atas, kebijakan Malaysia ini memiliki nilai ekonomi di dalamnya. Unsur-unsur itu dapat terlihat dari wilayah pelabuhan itu yang berada di selat sempit yang merupakan juga salah satu lalu lintas kapal-kapal Malaysia yang membawa hasil alam ke negara-negara lain. Nilai ekspor Malaysia cukup tinggi terutama sektor perkebunan, yang komoditi utamanya ialah Minyak Sawit. Untuk itu, kebijakan perluasan wilayah Pelabuhan Johor memang sangat diperlukan. Akan tetapi ini sedikit mengganggu hubungan antara kedua negara.

Hubungan antara Malaysia-Singapura mengalami pasang surut. Mulai dari kerjasama air bersih yang kurang baik, kemenangan Singapura atas kepemilikan Pedra Branca yang membuat publik Malaysia geram terhadap pemerintahnya. Lalu kini, kebijakan perluasan wilayah Johor tersebut yang dianggap Singapura melanggar batas-batas wilayah Singapura. Namun, tujuan Malaysia ini tak lain untuk terjadinya mobilisasi serta tercapainya integrasi ekonomi yang baik antar negara tetangga ASEAN khususnya Singapura (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 113-114).

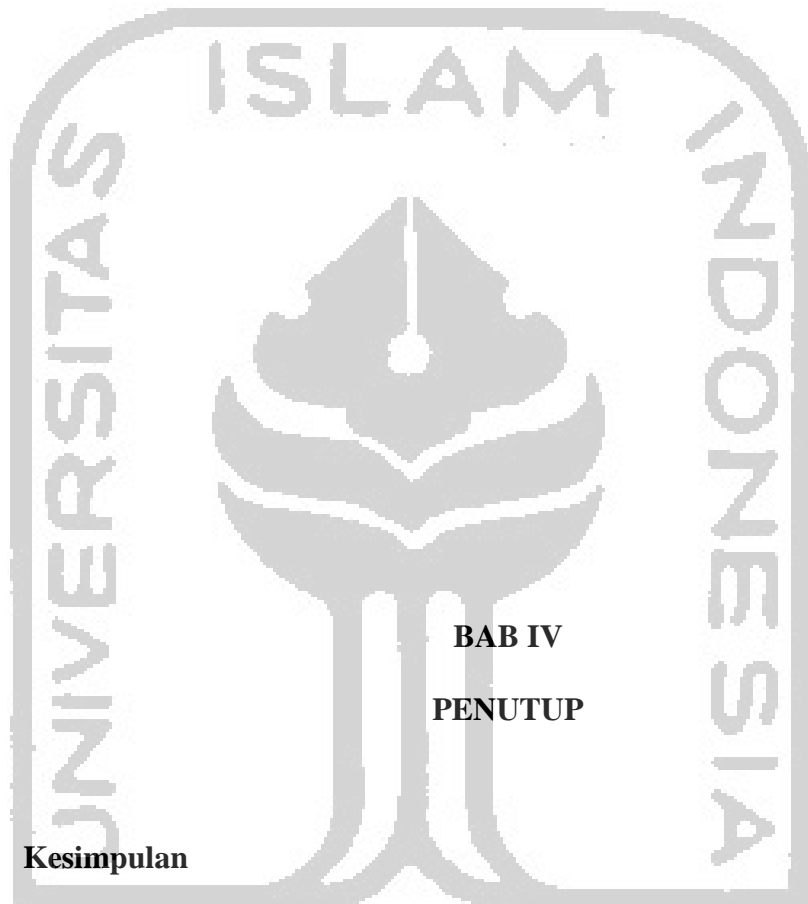
Tabel 3.1 Rangkuman dari Analisis berdasarkan konsep pendekatan keamanan milik Buzan

No	Indikator	Sikap Malaysia
1	Sistem Ekonomi	Menerapkan sistem ekonomi yang liberal.
2	Tren Globalisasi	Malaysia menangguhkan kebijakan perluasan tersebut namun akan tetap melakukannya setelah konflik mereda.

3	Dinamika Regional	Malaysia melakukan hubungan kerjasama dengan Singapura dalam penanganan konflik agara tujuan ekonomi mereka tercapai.
---	-------------------	---

Diolah dari buku Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde.

Dapat diartikan bahwa sistem ekonomi yang kuat, adaptasi terhadap globalisasi serta dinamika regional negara merupakan faktor-faktor Malaysia dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Tujuan dari kebijakan ini tak lain untuk menstabilkan serta meningkatkan perekonomian Malaysia. Tindakan atau sikap Malaysia dalam keamanan ekonomi antara lain, Menerapkan sistem ekonomi yang liberal, Malaysia menanggihkan kebijakan perluasan tersebut namun akan tetap melakukannya setelah konflik mereda, Malaysia melakukan hubungan kerjasama dengan Singapura dalam penanganan konflik agara tujuan ekonomi mereka tercapai.



4.1 Kesimpulan

Melalui penjabaran di atas, didapat hasil dari rumusan masalah untuk penelitian ini. Adapun penelitian ini, ingin mengidentifikasi mengapa Malaysia melanggar perjanjian dengan Singapura serta apa yang mendasari tindakan Malaysia tersebut. Lalu, bagaimana Malaysia mengambil tindakan atau sikap terhadap protes Singapura yang dilayangkan kepada Malaysia.

Malaysia ingin mempertegas bahwa wilayah tersebut ialah milik Malaysia. Melalui Perjanjian 1927 hingga pada tahun 1995 perjanjian tersebut mengalami perubahan. Upaya yang diambil Malaysia dengan tidak terlalu menghiraukan protes Malaysia akan tetapi menerima ajakan kerjasama dengan pemerintah Singapura untuk membahasa masalah wilayah tersebut.

Melalui kacamata Buzan, bentuk fisik atau wilayah, merupakan unsur penting dalam terbentuknya suatu negara. Negara akan hilang kredibilitasnya sebagai suatu entitas negara yang berdaulat jika wilayahnya tak mampu dijaga. Untuk itu, kebijakan ini sangat peting bagi Malaysia agara wilayahnya tidak bisa di klaim oleh Singapura,

Pemerintah Malaysia, sebagai institusi tertinggi, menyatakan bahwa kebijakan tersebut ialah demi kepentingan nasional mereka. Pemerintah Malaysia telah mempertimbangkan hal-hal yang perlu dilakukan demi tahapan selajutnya setelah kebajikan itu terealisasi. Adanya protes dari Singapura tak terlalu menjadi anacaman bagi pemerintahan Malaysia.

Namun, ajakan untuk menyelesaikan konflik dari Singapura diterima dengan baik oleh Malaysia. Hal ini menunjukkan malaysia bisa kooperatif dalam penyelesaian konflik dengan tujuan kemanan nasional mereka tetap terjaga.

Sikap-sikap yang diambil Malaysia dalam mempertahankan kebijakan serta wilayahnya dalam konteks keamanan politik milik Buzan yaitu. Kebijakan perluasan wilayah tersebut merupakan hasil dari konsep

negara Malaysia yaitu Rukun Negara. Lalu, Penerapan kebijakan perluasan wilayah tidak dibatalkan, ditangguhkan untuk sementara sampai konflik selesai. Yang terakhir, Mengadakan hubungan kerjasama dengan Singapura untuk menyelesaikan konflik.

Untuk dalam sektor ekonomi, Malaysia ingin mengamankan beberapa hal yang terkait dengan perdagangan. Antara lain, memperluas wilayah pelabuhan tersebut, agar memudahkan kapal-kapal Malaysia untuk berlabuh ataupun untuk melakukan lalu lintas perairan tersebut. Lalu, menerapkan sistem ekonomi yang liberal. Dan juga, Malaysia menangguhkan kebijakan perluasan tersebut namun akan tetap melakukannya setelah konflik mereda serta Malaysia melakukan hubungan kerjasama dengan Singapura dalam penanganan konflik agar tujuan ekonomi mereka tercapai.

4.2 Saran

Untuk kemajuan bidang ilmu, khususnya Ilmu Hubungan Internasional, diharapkan ada penelitian lebih lanjut yang nantinya ada korelasi dengan penelitian ini. Gunanya, untuk menutupi kekurangan dari penelitian ini. Penulis mengharapkan, nantinya ada pembahasan melalui sudut pandang yang berbeda agar dapat menjadibahan untuk didiskusikan. Serta menjadi literasi untuk penelitian selanjutnya.

Semoga skripsi ini dapat mejadi referensi di penelitian selanjutnya khususnya dalam bidang sosial karena bidang sosial dengan ekonomi memiliki hubungan saling tegak lurus dan tak dapat dipisahkan.



- Affairs, M. F. (2019, November 19). *Foreign Policy*. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs Singapore Web site: <http://www.mfa.gov.sg>
- Andriani, S. R. (2018, September 13). *Membaca Proteksionisme Gaya Mahathir & Arah Perekonomian Malaysia*. Retrieved from Bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180913/9/837810/membaca-proteksionisme-gaya-mahathir-arrah-perekonomian-malaysia>
- Asia, C. N. (2019, April 8). *Singapore, Malaysia maritime dispute: A timeline*. Retrieved from Channel News Asia: <https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-malaysia-maritime-dispute-port-limits-timeline-11006762>

- Aziz, A. R. (2010). Political Managements and Policies in Malaysia443Rukun Negara dalam Memperkukuhkan Ketahanan Negara. *Political Managements and Policies in Malaysia*, 447-449.
- Baswedan, A., Srihadi, E., Yusuf, A., Koban, A. W., & AR, H. Y. (2010). Menelusuri Konflik indonesia-Malaysia. (A. T. Muchtar, Ed.) *Update Indonesia*, V, 2-4.
- BBC. (2018, December 6). *Sengketa maritim Malaysia, Singapura: Saling tuduh mencaplok area pelabuhan*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46468189#orb-banner>
- Beckman, R., & Schofield, C. (2009, January 29). Ocean Development & International Law. *Moving Beyond Disputes Over Island Sovereignty: ICJ Decision Sets Stage for Maritime Boundary Delimitation in the Singapore Strait*, pp. 1-35.
- Buzan, B., Waever, O., & de Wilde, J. (1998). Security. In *A New Framework Analysis* (pp. 20-24). Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc.
- Buzan, B., Waever, O., & de Wilde, J. (1998). Security A new Framework For Analysis. In *Security A new Framework For Analysis* (pp. 140-143). Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc.
- Charney, J. L., & Alexander, L. M. (2004). Agreement Between the Government of Malaysia and the Government of the Republic of Singapore to Delimetyely Precisely the Territorial Waters Boundary to Accordance with The Straits of Settlement and Johore Territorial Waters Agreement 1927. In *INTERNATIONAL MARITIME BOUNDARIES* (p. 2351). Netherlands: MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS.
- Churcill, R. (2017, June 23). Ocean Development & International Law. *The General Dispute Settlement System of the UN Convention on the Law of the Sea: Overview, Context, and Use*, pp. 216-238.
- CNN Indonesia. (2019, January 9). *Malaysia-Singapura Sepakat Redam Sengketa Udara dan Maritim*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190108182800-106-359363/malaysia-singapura-sepakat-redam-sengketa-udara-dan-maritim>
- Fabrizi, R. (2017). Strategic Control. In *Control* (pp. 320-323). ANU Press.
- Ihsan, R. (2019). Sengketa Batas Darat dan Diplomasi Perbatasan Indonesia terhadap Malaysia. *Sengketa Batas Darat dan Diplomasi Perbatasan Indonesia terhadap Malaysia*, 4-5.
- Iwamoto, K. (2018, December 5). *Singapore and Malaysia tangle over air and sea sovereignty*. Retrieved from NIKKEI ASIAN REVIEW: <https://asia.nikkei.com/Politics/Malaysia-in-transition/Singapore-and-Malaysia-tangle-over-air-and-sea-sovereignty>
- Mokhtar, F. (2018, December 5). *Why the Singapore-Malaysia maritime and airspace disputes matter*. Retrieved from TODAYonline.com: <https://www.todayonline.com/singapore/why-singapore-malaysia-maritime-and-airspace-disputes-matter>

- Noor, E., & Qistina, T. N. (2017). Great Power Rivalries, Domestic Politics and Malaysian Foreign Policy. *Asian Security*, 201-202.
- Ramadani, A. (2018, July 16). *Negara yang Menganut Sistem Ekonomi Campuran*. Retrieved from Kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/arma43488/5b4c973a5e1373123407ebd5/negara-yang-menganut-sistem-ekonomi-campuran?page=3>
- Reuters. (2018, 12 5). *Singapura Protes Keras Rencana Malaysia Perluas Pelabuhan*. Retrieved from voaindonesia.com: <https://www.voaindonesia.com/a/singapura-protes-keras-rencana-malaysia-perluas-pelabuhan/4687483.html>
- Sugiyono, P. (2015). Pengertian Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. In P. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (pp. 7-9). Bandung: ALFABETA, CV.
- Tan, K. P. (2011). The Ideology of Pragmatism: Neo-liberal Globalisation and Political Authoritarianism in Singapore. *Journal of Contemporary Asia*, 69-72.
- Tang, C. F., Cheam, C. L., & Ong, S. C. (2015). Comparing the contributions of tourism and non-tourism exports to economic growth in Malaysia. *Current Issues in Tourism*, 1-2.
- Tortajada, C., & Pobre, K. (2011). The Singapore–Malaysia water relationship: an analysis of the media perspective. *Hydrological Sciences Journal – Journal des Sciences Hydrologiques*, 600-601.